

**LAPORAN KINERJA  
DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2025**



**DINAS/BADAN/KECAMATAN /SEKRETARIAT  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan yaitu meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, 18 Februari 2026  
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN MAGETAN



AUBARTINI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19740428 199901 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG .....	4
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI .....	5
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI.....	6
D. SUMBER DAYA ORGANISASI.....	7
1. Kepegawaian.....	7
2. Sarana dan Prasarana.....	9
3. Anggaran (setelah perubahan).....	10
E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	10
F. LANDASAN HUKUM ( <i>diurutkan sesuai Hierarki, nomor, dan tahunnya</i> ).....	12
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 .....	14
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026.....	15
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024 - 2026 .....	17
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026.....	18
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029) .....	20
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029.....	21
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029 .....	24
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 .....	25
RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	29
RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 .....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	41

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	43
1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025 .....	43
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; .....	51
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; .....	52
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya; .....	54
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:.....	54
INOVASI TAHUN 2025 .....	57
PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025 .....	58
BAB IV PENUTUP .....	60
A. SIMPULAN .....	60
RENCANA AKSI TAHUN 2026 .....	62
LAMPIRAN.....	65
A. Matriks Renstra RPD dan RPJMD .....	65
B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD.....	65
C. Matriks Renja Tahun n dan Perubahannya .....	65
D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun n dan perubahannya .....	65
E. Pengukuran Kinerja.....	65
F. Pohon Kinerja .....	65
G. Rencana Aksi Tahun 2026 .....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun n adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun n secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang ekonomi, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun n bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun berikutnya.

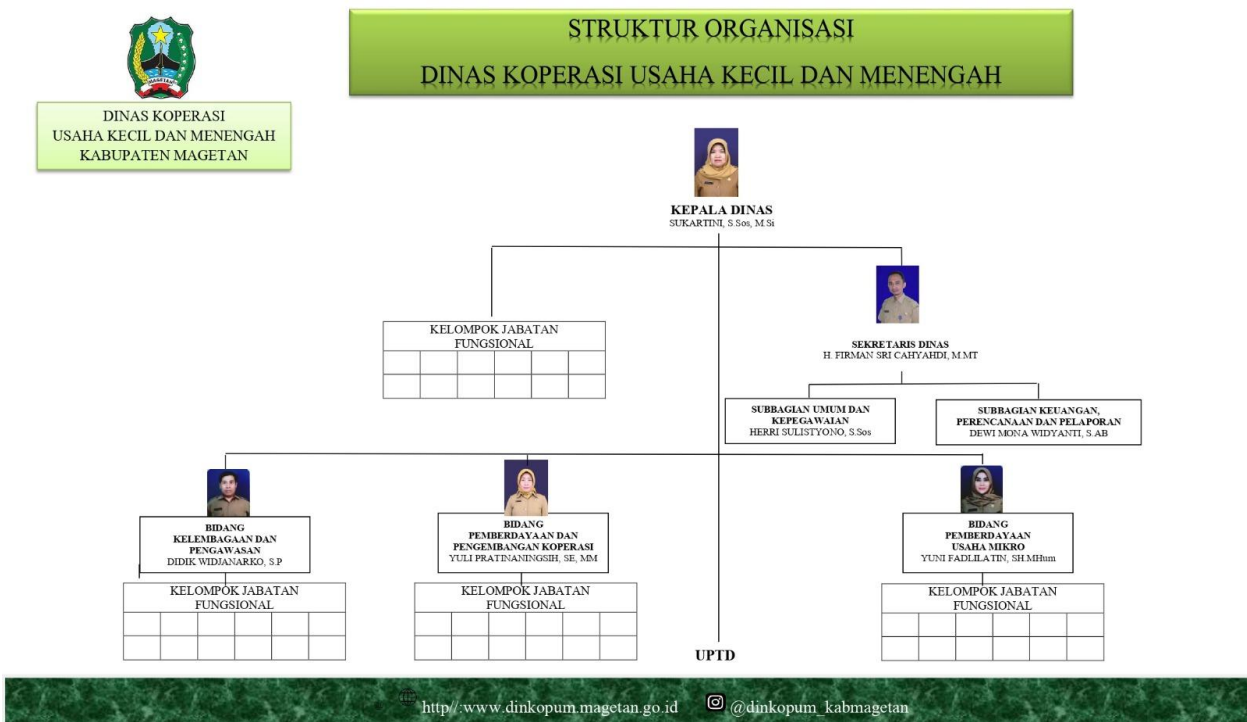
## **B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan pada pasal 2, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

1. Sekretaris, membawahi:
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
5. UPTD; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut bagan susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.  
Susunan Organisasi  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Magetan



### C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan pada pasal 3, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

#### **D. SUMBER DAYA ORGANISASI**

##### **1. Kepegawaian**

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. didukung oleh pegawai sebanyak 27 orang, dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.  
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan  
Per 31 Desember 2025

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kebutuhan (orang)</b>	<b>Realisasi (orang)</b>	<b>Kekurangan / Kelebihan (orang)</b>
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	1	-
2	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	1	-
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah	1	1	-
4	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	1	1	-
5	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	1	1	-
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	-
7	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	1	-
8	Penelaah Teknis Kebijakan	11	5	6
9	Pamong Pemerintahan	2	2	-
10	Fasilitator Pemerintahan	3	3	-
11	Pengolah Data Dan Informasi	10	0	10

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan / Kelebihan (orang)
12	Pengadministrasi Perkantoran	3	2	1
13	Operator Layanan Operasional	2	2	-
14	Pengelola Umum Operasional	1	1	-
15	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	5	2	3
16	JF Analis Kebijakan Ahli Madya	2	0	2
17	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	6	0	6
18	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda	7	4	3
19	JF Pengawas Koperasi Ahli Madya	3	0	3
20	JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama	10	2	8
21	JF Arsiparis Terampil	1	0	1
22	JF Arsiparis Mahir	1	0	1
23	JF Arsiparis Penyelia	1	0	1
24	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1
25	JF Perencana Ahli Pertama	2	0	2
26	JF Perencana Ahli Muda	1	0	1
	Jumlah	79	30	49

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.  
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan  
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang  
Per 31 Desember 2025

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	-
2	Pembina Utama Muda/IV-c	1
3	Pembina Tk.I/IV-b	1
4	Pembina/IV-a	3
5	Penata Tk.I/III-d	6
6	Penata/III-c	2
7	Penata Muda Tk.I/III-b	4
8	Penata Muda/III-a	10
	Jumlah	27

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.  
Tingkat Pendidikan Pegawai  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan  
Per 31 Desember 2025

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	4
3	Strata 1/Sederajad	21
4	Diploma	-
5	SMA/Sederajad	5
6	SMP/Sederajad	
7	SD/Sederajad	
	Jumlah	30

d. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	20
	Jumlah	30

**2. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di 31 Desember 2025 per 31 Desember 2025 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Aset Tetap Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan  
per 31 Desember 2025  
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Per 31 Desember Tahun 2025 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	-			
2	Peralatan dan Mesin	1.528.939.543	20.930.000		1.549.869.543
3	Gedung dan Bangunan	2.136.724.000			2.136.724.000
4	Aset Tetap Lainnya	5.185.000			5.185.000
	Jumlah	3.670.848.543	20.930.000		3.691.778.543

### 3. Anggaran (setelah perubahan)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 Alokasi anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.158.767.698,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5  
Anggaran Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan  
Tahun Anggaran 2025 dan 2026  
(Sebelum Penyusutan)

<b>Program</b>	<b>Tahun 2025</b>	<b>Tahun 2026</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.358.804.568	3.430.456.207
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	8.412.000	11.000.000
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	138.753.800	106.750.000
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	89.700.000	18.000.000
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	286.500.000	50.000.000
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	385.156.000	63.750.000
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	693.941.330	289.500.000
Program Pengembangan UMKM	197.500.000	150.000.000

## E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika

birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan sesuai tugas dan fungsinya tahun 2025 adalah:

1. Masih rendahnya daya saing Koperasi;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang Menghambat Pengawasan yang Optimal;
3. Kurangnya Pengelolaan Kelembagaan yang Terstruktur dan Penerapan Peraturan yang Belum Optimal;
4. Kurangnya Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang Optimal dalam Meningkatkan Kapasitas SDM, Diversifikasi Usaha, dan Pengembangan Bisnis Koperasi;
5. Masih rendahnya daya saing UMKM;
6. Kurangnya Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM yang Optimal dalam Meningkatkan Kapasitas SDM, Diversifikasi Usaha, dan Pengembangan Bisnis UMKM

## **F. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025
7. Keputusan Bupati Magetan nomor 100.3.4.2/320/kept./403.013/2025 tentang penetapan indikator kinerja utama, tujuan/sasaran dan satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten magetan tahun 2025-2029.
8. Peraturan Bupati Magetan nomor 38 tahun 2025 tentang rencana strategis perangkat daerah kabupaten magetan tahun 2025-2029

## **G. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi..

BAB II	<b>PERENCANAAN KINERJA</b> Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;</li><li>2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;</li><li>3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;</li><li>4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);</li><li>5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;</li><li>6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;</li><li>7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).</li></ol> B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV	<b>PENUTUP</b> Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Perjanjian Kinerja</li><li>2) Lain-lain yang dianggap perlu</li></ol>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 - 2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan Bupati Magetan, Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024 – 2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Keterkaitan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan  
dengan Tujuan Bupati Magetan  
Tahun 2024-2026

Tujuan (RPD) Ke-1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan. Indikator: Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran (RPD) Ke-1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan Indikator: Persentase Pertumbuhan PDRB Sector Unggulan Kabupaten Magetan
Tujuan (Renstra) Ke-1 Meningkatnya Omset Koperasi Dan Usaha Mikro Indikator: Nilai Omset Koperasi Dan Usaha Mikro
Sasaran (Renstra) Ke-1 Meningkatnya Produktivitas Koperasi Indikator: Persentase Koperasi Sehat
Sasaran (Renstra) Ke-2 Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro Indikator: Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas

Tujuan (RPD) Ke-3 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indikator: Persentase Penduduk Miskin
Sasaran (RPD) Ke-2 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah Indikator: Indeks Gini
Tujuan (Renstra) Ke-1 Meningkatnya Omset Koperasi Dan Usaha Mikro Indikator: Nilai Omset Koperasi Dan Usaha Mikro
Sasaran (Renstra) Ke-1 Meningkatnya Produktivitas Koperasi Indikator: Persentase Koperasi Sehat Sasaran (Renstra) Ke-2 Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro Indikator: Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas

### **1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana Tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan periode 2025-2029 (Tahun renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
						2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Omset Koperasi dan Usaha Mikro			Nilai omset koperasi	Juta Rupiah	832.222,8	848.867,3	865.844,6
				Nilai omset usaha Mikro	Juta Rupiah	320.634	323.334	325.584
		1.1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase koperasi Sehat	%	70	73	75
		1.2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	UM	2	3	4
		1.3	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	Angka	91,3	91,5	91,9
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM	Skor	83	83,5	84

*Sumber : Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah periode 2024 - 2026*

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024 - 2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Strategi dan Arah Kebijakan  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan  
Tahun 2024 - 2026

<b>TUJUAN</b> : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan			
<b>SASARAN</b> : Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Omset Koperasi dan Usaha Mikro	1. Meningkatnya Produktivitas koperasi	Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi melalui pelayanan legalitas dan kualitas koperasi dan penilaian kesehatan koperasi
	2. Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Peningkatan pengembangan KUMKM	Meningkatkan pengembangan KUMKM melalui pendataan yang akurat, peningkatan dan pengembangan akses kerjasama usaha KUMKM, pemantauan/pendampingan pengembangan permodalan, peningkatan legalitas dan kualitas produk UKMKM, dan pengembangan usaha KUMKM
	3. Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UMKM melalui peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, pelatihan organisasi manajemen usaha KUMKM, peningkatan jiwa kewirausahaan, dan pelatihan strategi pemasaran

### **3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024 - 2026**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas koperasi	1.1	Persentase Koperasi sehat	%	<b>Kategori Penilaian Koperasi:</b> Sehat: 80,01 – 100 Cukup Sehat: 66,01 – 80,00 Dalam Pengawasan: 51,01 – 66 Dalam Pengawasan Khusus: 0 - 51	$\frac{\text{Jumlah Koperasi sehat tahun n}}{\text{Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya}} \times 100 \%$	Laporan data Keragaan koperasi
Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	2.1	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	Usaha Mikro	<b>UM naik kelas</b> mengacu pada proses di mana sebuah usaha berusaha meningkatkan kualitas produk dan usaha, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, membangun branding yang kuat, memenuhi standarisasi produk dan meningkatkan kemitraan serta pangsa pasar	Jumlah usaha mikro yang naik kelas pada tahun n	Laporan keragaan usaha mikro

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

## B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025-2029.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan periode 2025-2029 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Keterkaitan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dengan  
Visi dan Misi Bupati Magetan  
Tahun 2025-2029

Visi (RPJMD): MAGETAN NYAMAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN
Misi (RPJMD) ke-2 Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan
Tujuan (RPJMD) ke-2 berkembangnya perekonomian daerah yang berkelanjutan Indikator: Pertumbuhan ekonomi
Sasaran (RPJMD) ke-1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator: Indeks keberdayaan ekonomi Sasaran (RPJMD) ke-5 menurunnya angka pengangguran melalui perluasan lapangan kerja serta menumbuhkan kewirausahaan & meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin dan rentan Indikator: Pertumbuhan nilai omzet koperasi dan usaha mikro
Tujuan (Renstra) ke-.1 Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM Indikator: Nilai Omset Koperasi Nilai Omset UM
Sasaran (Renstra) ke-.1 Meningkatnya Produktivitas Koperasi

Indikator: Persentase Koperasi yang Berkualitas (Lemwas)
Tujuan (Renstra) ke-1 Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM Indikator: Nilai omset Koperasi Nilai Omset UMKM
Sasaran (Renstra) ke-2 Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro Indikator: Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas
Tujuan (RPJMD) ke-3 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Professional, Adaptif, dan Transparan Indikator: Indeks reformasi birokrasi
Sasaran (RPJMD) ke-1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator : SAKIP
Tujuan (Renstra) ke-1 Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM Indikator: Nilai omset Koperasi Nilai Omset UMKM
Sasaran (Renstra) ke-3 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Koperasi UKM Indikator: Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM Indeks Kepuasan Masyarakat

### 1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan (Tahun renstra 2025-2029). Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.6**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2025-2030**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang Koperasi dan UKM.  Sasaran RPJMD: Menurunnya Angka Pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan  Sasaran RPJMD: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan  Sasaran RPJMD: Meningkatnya	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM		Nilai omset Koperasi	Rp848.867.237.956	Rp868.844.582.715	Rp890.161.474.370	Rp912.924.703.857	Rp936.941.197.934	Rp962.321.194.964	
			Nilai Omset UMKM	Rp326.277.900.000	Rp332.386.500.000	Rp338.543.100.000	Rp345.323.880.000	Rp352.944.900.000	Rp362.222.400.000	
		Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Lemwas)	70,54	71	71,429	71,846	72,165	72,472	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	3	4	4	4	5	5	
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Koperasi UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM	92	92,5	93	93,25	93,5	94	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	83,75	84	84,5	85	85,5	

*Sumber: Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Periode 2025-2030*

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Strategi dan Arah Kebijakan  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan  
Tahun 2025 - 2029

VISI : Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan			
MISI ke-2 : Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Meningkatnya Produktivitas Koperasi	1. Penguatan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi melalui Peningkatan Kapasitas, Akses Permodalan, dan Kemitraan	1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 2. Meningkatkan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi 3. Mendorong Penilaian Kesehatan Koperasi 4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 5. Meningkatkan Kualitas SDM Perkoperasian 6. Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Koperasi 7. Pembentukan dan pembinaan koperasi desa melalui skema Koperasi Merah Putih yang terintegrasi dengan potensi desa, dukungan kelembagaan, manajemen, pemasaran, keuangan dan teknologi.
	2. Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Kapasitas dan Kualitas, Akses Pasar, Kemitraan dan Pemberdayaan SDM	1. Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing UMKM 2. Pemberdayaan UMKM Melalui Kemudahan Perizinan dan Akses Pembiayaan 3. Mendorong Pengembangan Kemitraan UMKM dan Peningkatan Akses Pasar 4. Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Pendataan dan Penguatan Kelembagaan

			5. Meningkatkan Sinergi Antar OPD dan Lembaga Terkait untuk Mendukung Pengembangan UMKM dan Koperasi
	3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi yang Profesional serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien		

### 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2025-2029**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas Koperasi	1.1	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Lemwas)	Persentase	<p><b>Koperasi aktif</b> adalah koperasi yang secara rutin menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menjalankan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya.</p> <p><b>Koperasi Berkualitas</b> Adalah koperasi aktif yang melaksanakan RAT pada tahun n dan meningkat volume usaha serta assetnya</p>	<p>Jumlah Koperasi aktif yang melaksanakan RAT tahun n dan meningkat volume usaha dan aset</p> <p>-----x100 %</p> <p>Jumlah total Koperasi Aktif</p>	Laporan data Keragaan koperasi (Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi)
Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	2.1	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Usaha Mikro	<p>Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet tahunan maksimal Rp 300 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, yang menjadi bagian dari UMKM di Indonesia dan memiliki peran penting dalam ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja.</p> <p>Usaha Mikro naik kelas Transformasi Usaha Mikro dengan meningkatkan berbagai aspek seperti kualitas produk, manajemen (keuangan, SDM, operasional), inovasi, legalitas (NIB, izin), jangkauan pemasaran (digital, ekspor), sehingga memiliki daya saing kuat, kemandirian, serta potensi kontribusi lebih besar pada ekonomi nasional</p>	Jumlah UM naik kelas pada tahun n	Laporan keragaan usaha mikro (Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro)

<p>Sasaran 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi yang Profesional serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien</p>	<p>3.1</p>	<p>Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM</p>	<p>Nilai</p>	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bobot 30 komponen perencanaan</li> <li>- Bobot 30 komponen pengukuran kinerja</li> <li>- Bobot 15 komponen pelaporan kinerja</li> <li>- Bobot 25 komponen evaluasi</li> </ul> <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah</li> <li>2 Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</li> <li>3 Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</li> </ol> <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengukuran kinerja telah dilakukan</li> <li>2 Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</li> <li>3 Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</li> </ol> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika</li> <li>2 Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap</li> </ol>	<p>30% x Nilai Perencanaan) + (30% x Nilai Pengukuran) + (15% x Nilai Pelaporan) + ( 25% x Nilai Evaluasi)</p>	<p>Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan</p>
--	------------	---------------------------------------	--------------	---	--	---

				<p>3 LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan</p> <p>4 Memuat Rencana aksi tahun berikutnya</p> <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <p>1 Kelengkapan dokumen SAKIP</p> <p>2 Keselarasan dokumen perencanaan</p> <p>3 Ketercapaian Kinerja</p> <p>4 LHE ditindaklanjuti</p> <p>5 Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE</p> <p>6 LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya</p>		
	3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM	Indeks	<p>9 Unsur/parameter IKM :</p> <p>1. Persyaratan</p> <p>2. Sistem, mekanisme dan prosedur</p> <p>3. Waktu penyelesaian</p> <p>4. Biaya / tarif</p> <p>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan</p> <p>6. Kompetensi pelaksana</p> <p>7. Perilaku pelaksana</p> <p>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan</p> <p>9. Sarana dan prasarana</p>	<p>Nilai IKM = (Jumlah Indeks per Parameter : Jumlah parameter ) x 25</p>	<p>Laporan hasil IKM Dinas Koperasi UKM</p>

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029

## RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun n termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025:

**Tabel 2.9**  
**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	-		Nilai omset koperasi	Juta Rupiah	832.222,80
				Nilai Omset UMKM	Juta Rupiah	320.634
		01.01	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Persentase	73
		01.02	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	Usaha Mikro	3
		01.03	Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM	Angka	91,5
				Indeks kepuasan masyarakat Dinas Koperasi UKM	Skor	83,5

*Sumber: Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan:

**Tabel 2.10**  
**Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Tahun 2025**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indeks	82	3.490.340.590
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	8	46.700.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	35.000.000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	11.700.000
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran perangkat daerah	Persentase	88	2.901.636.540
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21	2.901.636.540
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	Orang	30	30.000.000
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	20	30.000.000
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Paket	66	214.424.050
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7.000.000
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	66.674.050
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6.000.000
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	24.000.000
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	7.160.000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24	6.840.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	96.750.000
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor	Laporan	12	171.160.000
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	35.000.000
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Laporan	4	11.160.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
		Kantor yang Disediakan			
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	125.000.000
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	126.420.000
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	67.420.000
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	59.000.000
24	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki ijin Usaha	Persentase	10	19.000.000
25	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha yang dimiliki koperasi	Unit	3	9.500.000
26	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kas Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	50	9.500.000
27	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas yang dimiliki koperasi	Unit	2	9.500.000
28	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Unit Usaha	50	9.500.000
29	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi Aktif	Koperasi	560	159.250.000
30	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang periksa dan diawasi	Koperasi	60	159.250.000
31	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola	Unit Usaha	160	139.000.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
		kelembagaan			
32	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Unit Usaha	40	20.250.000
33	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat	Koperasi	35	98.750.000
34	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya dan dibina	Koperasi	35	98.750.000
35	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian Kesehatan	Unit Usaha	40	13.750.000
36	Penilaian kesehatan koperasi melalui tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan	Jumlah koperasi yang diberi penilaian kesehatan	Unit Usaha	160	85.000.000
37	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	Persentase	20	93.000.000
38	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	koperasi	100	93.000.000
39	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	100	93.000.000
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang berkembang yang berkembang usahanya	Koperasi	30	153.608.200
41	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan	Koperasi	100	153.608.200
42	Fasilitasi kemitraan koperasi yang keanggotaannya daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraannya	Unit Usaha	20	19.531.700
43	Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Jumlah unit usaha yang produktif bernilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Unit Usaha	25	50.000.000
44	Pemulihan usaha koperasi yang keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dipulihkan usahanya	Unit Usaha	30	9.320.000
45	Fasilitasi Akses permodalan koperasi yang keanggotaannya Derah kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	50	29.141.750

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
46	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pelaporannya	Unit Usaha	50	15.000.000
47	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota	Unit Usaha	25	30.614.750
48	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentasi UMKM yang telah diberdayakan	Persentase	32	583.250.000
49	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	Usaha Mikro	55	583.250.000
50	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Unit Usaha	40	102.250.000
51	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perijinan	Unit Usaha	15	19.500.000
52	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	2	217.750.000
53	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Koperasi	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	20	2.500.000
54	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	Orang	80	241.250.000
55	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase UMKM yang naik kelas	Persentase	1	235.610.500
56	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	Usaha Mikro	4	235.610.500
57	Pengembang Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	20	92.500.000
58	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang difasilitasi	Orang	40	74.456.000
59	Produksi dan pengelolaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan teknologi	Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SSDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	25	68.654.500

*Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025*

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 13 bulan Januari tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.11**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	1.1	Persentase Koperasi Sehat	Persentase	73
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	2.1	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	Usaha Mikro	3
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Koperasi UKM	3.1	Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM	Angka	91,5
		3.2	Indeks kepuasan masyarakat Dinas Koperasi UKM	Skor	83,5

*Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025*

### **RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan indikator kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
3. Perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran

**Tabel 2.12**  
**Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM			Nilai omset koperasi	Juta Rupiah	832.222,80
				Nilai Omset UMKM	Juta Rupiah	320.634
		01.01	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Lemwas)	Persentase	70,54
		01.02	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Naik kelas	Usaha Mikro	1,32
		01.03	Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Persentase	92
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	83,5

*Sumber: Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025*

Dalam rangka pencapaian rencana kerja perubahan yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah:

**Tabel 2.13**  
**Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
**Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indeks	82	3.358.804.568

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	8	37.135.900
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	30.241.650
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	6.894.250
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran perangkat daerah	Persentase	88	2.852.920.718
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21	2.852.920.718
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	Orang	30	30.000.000
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	20	30.000.000
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Paket	66	159.929.950
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7.000.000
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	63.443.550
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6.000.000
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	18.485.650
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	5.160.750
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24	6.840.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	53.000.000
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang diadakan	Unit	2	-
18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	1	-
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas atau lapangan yang disediakan	Unit	1	-
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor	Laporan	12	152.398.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	35.000.000
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	11.160.000
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	106.238.000
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	126.420.000
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	67.420.000
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	59.000.000
27	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki ijin Usaha	Persentase	10	8.412.000
28	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha yang dimiliki koperasi	Unit	3	4.206.000
29	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kas Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	50	4.206.000
30	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas yang dimiliki koperasi	Unit	2	4.206.000
31	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Unit Usaha	50	4.206.000
32	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi Aktif	Koperasi	560	138.753.800
33	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Koperasi	60	138.753.800

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
34	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan	Unit Usaha	160	127.000.000
35	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Unit Usaha	40	11.753.800
36	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat	Koperasi	35	89.700.000
37	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya dan dibina	Koperasi	35	89.700.000
38	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian Kesehatan	Unit Usaha	20	12.200.000
39	Penilaian kesehatan koperasi melalui tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan	Jumlah koperasi yang diberi penilaian kesehatan	Unit Usaha	160	77.500.000
40	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	Persentase	20	286.500.000
41	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	koperasi	100	286.500.000
42	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	470	286.500.000
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang berkembang yang berkembang usahanya	Koperasi	30	385.156.000
44	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan	Koperasi	100	385.156.000
45	Fasilitasi kemitraan koperasi yang keanggotaannya daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraannya	Unit Usaha	20	133.208.150
46	Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Jumlah unit usaha yang produktif bernilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Unit Usaha	25	45.000.000
47	Pemulihan usaha koperasi yang keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dipulihkan usahanya	Unit Usaha	30	5.166.000
48	Fasilitasi Akses permodalan koperasi yang keanggotaannya Derah kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	50	173.141.750

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
49	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pelaporannya	Unit Usaha	50	8.909.600
50	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota	Unit Usaha	25	19.730.500
51	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentasi UMKM yang telah diberdayakan	Persentase	32	693.941.330
52	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	Usaha Mikro	55	693.941.330
53	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Unit Usaha	40	132.147.600
54	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perijinan	Unit Usaha	10	19.500.000
55	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	9	341.043.730
56	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Koperasi	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	15	1.250.000
57	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	Orang	80	200.000.000
58	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase UMKM yang naik kelas	Persentase	1	197.500.000
59	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	Usaha Mikro	4	197.500.000
60	Pengembang Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	20	92.500.000
61	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang difasilitasi	Orang	30	56.000.000
62	Produksi dan pengelolaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan teknologi	Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SSDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	25	49.000.000

*Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025*

Perangkat daerah melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 29 bulan Desember tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.14**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	1.1	Persentase koperasi yang berkualitas	Persentase	70,54
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	2.1	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Usaha Mikro	3
3	Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyeenggaraan Pemerintah Daerah	3.1	Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM	Angka	92
		3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM	Skor	83,5

*Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025*

Beberapa perubahan kebijakan perjanjian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Magetan adalah:

1. Indikator kinerja persentase koperasi sehat berganti menjadi persentase koperasi yang berkualitas dan targetnya juga berubah
2. Target Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM meningkat dari target 91,5 menjadi 92

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Capaian Kinerja**

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	$\geq 100\%$	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	$75\% \text{ s.d } < 100\%$	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	$55\% \text{ s.d } < 75\%$	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	$< 55\%$	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025.

## A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

### 1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja (Induk) Tahun 2025**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
**Tahun 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	73%	73%	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	3	3	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Koperasi UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM	91,50	92,42	101%	Sangat Berhasil
	Indeks kepuasan masyarakat Dinas Koperasi UKM	83,50	83,58	100%	Sangat Berhasil

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
**Tahun 2025**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan (PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN)	Pagu anggaran (perubahan terakhir) Rp	Realisasi Anggaran Rp	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Output/kinerja	(Pagu anggaran x capaian output/kinerja)	(Pagu anggaran x capaian output / kinerja) - Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	908.531.800	878.317.680	70,54%	70,63%	100%	909.690.970	31.373.290	3,45%
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	891.441.330	882.985.588	3	3	100%	891.441.330	8.455.742	0,95%
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM	3.358.804.568	3.175.755.962	92	92,42	100%	3.374.138.241	198.382.279	5,88%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM			83,5	83,58	100%			

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Rincian Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
**Tahun 2025**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan (PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN)	Pagu anggaran (perubahan terakhir) Rp	Realisasi Anggaran Rp	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Output/kinerja	(Pagu anggaran x capaian output / kinerja) - Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	908.531.800	878.317.680	70,54%	70,63%	100%	909.690.970	31.373.290	3,45%
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	8.412.000	5.573.000	10%	10%	100%	8.412.000	2.839.000	33,75%
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha yang Dimiliki Koperasi	4.206.000	2.786.500	3	3	100%	4.206.000	1.419.500	33,75%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.786.500	1.419.500	50	50	100%	2.786.500	1.367.000	49,06%
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas yang Dimiliki Koperasi	2.786.500	1.419.500	2	2	100%	2.786.500	1.367.000	49,06%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.786.500	1.419.500	50	50	100%	2.786.500	1.367.000	49,06%
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	138.763.800	133.295.591	560	560	100%	138.763.800	5.468.209	3,94%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi	138.763.800	133.295.591	60	60	100%	138.763.800	5.468.209	3,94%
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	127.000.000	124.467.000	160	160	100%	127.000.000	2.533.000	1,99%

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan (PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN)	Pagu anggaran (perubahan terakhir) Rp	Realisasi Anggaran Rp	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Output/kinerja	(Pagu anggaran x capaian output/kinerja)	(Pagu anggaran x capaian output / kinerja) - Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	11.753.800	8.828.591	40	40	100%	11.753.800	2.925.209	24,89%
<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>	89.700.000	89.004.174	35	35	100%	89.700.000	695.826	0,78%
<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang Dinilai Kesehatan dan Dibina</b>	89.700.000	89.004.174	35	35	100%	89.700.000	695.826	0,78%
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	12.200.000	11.633.174	20	20	100%	12.200.000	566.826	4,65%
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	77.500.000	77.371.000	160	160	100%	77.500.000	129.000	0,17%
<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Presentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan</b>	286.500.000	279.850.000	21,04%	18,00%	86%	245.104.563	-	-14,18%
<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</b>	286.500.000	279.850.000	100	100	100%	286.500.000	6.650.000	2,32%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	286.500.000	279.850.000	470	470	100%	286.500.000	6.650.000	2,32%
<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi yang Berkembang Usahanya</b>	385.156.000	370.594.915	30	30	100%	385.156.000	14.561.085	3,78%
<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pemberdayaan dan Perlindungan</b>	385.156.000	370.594.915	100	100	100%	385.156.000	14.561.085	3,78%
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	133.208.150	129.325.450	20	20	100%	133.208.150	3.882.700	2,91%
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	45.000.000	44.785.000	25	25	100%	45.000.000	215.000	0,48%
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	5.166.000	5.140.000	30	30	100%	5.166.000	26.000	0,50%
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	173.141.750	165.788.250	50	50	100%	173.141.750	7.353.500	4,25%
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang	Jumlah Koperasi yang	8.909.600	6.956.400	50	50	100%			21,92%

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan (PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN)	Pagu anggaran (perubahan terakhir) Rp	Realisasi Anggaran Rp	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Output/kinerja	(Pagu anggaran x capaian output / kinerja) - Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)	
Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Difasilitasi Pelaporannya						8.909.600	1.953.200	
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	19.730.500	18.599.815	25	25	100%	19.730.500	1.130.685	5,73%
<b>Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro</b>	<b>Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas</b>	891.441.330	882.985.588	3	3	100%	891.441.330	8.455.742	0,95%
<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Lemwas)</b>	693.941.330	689.185.588	32%	30%	94%	650.569.997	-	-5,94%
	<b>Pertumbuhan Wirausaha (PRU)</b>	693.941.330	689.185.588	32%	30%	94%	650.569.997	-	-5,94%
<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan</b>	693.941.330	689.185.588	55	55	100%	693.941.330	4.755.742	0,69%
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	132.147.600	129.606.852	40	40	100%	132.147.600	2.540.748	1,92%
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah Mendapatkan Perizinan	19.500.000	19.250.000	10	10	100%	19.500.000	250.000	1,28%
Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	341.043.730	340.166.736	9	9	100%	341.043.730	876.994	0,26%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200.000.000	198.912.000	80	80	100%	200.000.000	1.088.000	0,54%
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1.250.000	1.250.000	15	15	100%	1.250.000	-	0,00%
Fasilitasi Pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	0	0	0%	-	-	0,00%
<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Proporsi UMKM Menjalinkan Kemitraan dan Diperluas akses pasar (Pemasaran)</b>	197.500.000	193.800.000	13,62%	13,62%	100%	197.500.000	3.700.000	1,87%
<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Usaha Mikro yang telah menyelesaikan proses pengembangan berorientasi peningkatan skala menjadi Usaha Kecil</b>	197.500.000	193.800.000	4	4	100%	197.500.000	3.700.000	1,87%
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	92.500.000	90.200.000	20	20	100%	92.500.000	2.300.000	2,49%
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	56.000.000	54.800.000	30	30	100%	56.000.000	1.200.000	2,14%

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan (PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN)	Pagu anggaran (perubahan terakhir) Rp	Realisasi Anggaran Rp	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Output/kinerja	(Pagu anggaran x capaian output/kinerja)	(Pagu anggaran x capaian output / kinerja) - Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	49.000.000	48.800.000	25	25	100%	49.000.000	200.000	0,41%
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	0	0	0%	-	-	0,00%
<b>Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM</b>	3.358.804.568	3.175.755.962	92,00%	92,42%	100%	3.374.138.241	198.382.279	5,88%
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM</b>	3.358.804.568	3.175.755.962	92,00%	92,42%	100%	3.374.138.241	198.382.279	5,88%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan II Skor</b>	3.358.804.568	3.175.755.962	82%	83,05%	101%	3.401.813.651	226.057.689	6,65%
	<b>Persentase Capaian kinerja dan anggaran II %</b>	3.358.804.568	3.175.755.962	82%	83,05%	101%	3.401.813.651	226.057.689	6,65%
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II Dokumen</b>	37.135.900	36.545.900	8	8	100%	37.135.900	590.000	1,59%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.241.650	30.241.650	4	4	100%	30.241.650	-	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.892.250	6.304.250	4	4	100%	6.892.250	588.000	8,53%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah II %</b>	2.852.920.718	2.704.515.430	88%	92,83%	105%	3.009.469.472	304.954.042	10,13%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.852.920.718	2.704.515.430	20	20	100%	2.852.920.718	148.405.288	5,20%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	0	-	0%	-	-	0,00%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</b>	-	-	0	-	0%	-	-	0,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0	-	0%	-	-	0,00%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian Sesuai Prosedur II Orang</b>	30.000.000	28.299.000	30	27	90%	27.000.000	- 1.299.000	-4,81%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti	30.000.000	28.299.000	30	27	90%	-	-	-4,81%

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan (PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN)	Pagu anggaran (perubahan terakhir) Rp	Realisasi Anggaran Rp	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Output/kinerja	(Pagu anggaran x capaian output / kinerja) - Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)	
Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						27.000.000	1.299.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	159.929.950	151.741.955	58	58	100%	159.929.950	8.187.995	5,12%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.000.000	6.788.685	4	4	100%	7.000.000	211.315	3,02%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	63.443.560	58.096.919	6	6	100%	63.443.560	5.346.641	8,43%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6.000.000	5.633.290	4	4	100%	6.000.000	366.710	6,11%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18.485.650	18.122.650	4	4	100%	18.485.650	363.000	1,96%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.160.750	4.214.625	4	4	100%	5.160.750	946.125	18,33%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6.840.000	5.940.000	24	24	100%	6.840.000	900.000	13,16%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.000.000	52.945.786	12	12	100%	53.000.000	54.214	0,10%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	152.398.000	130.928.097	12	12	100%	152.398.000	21.469.903	14,09%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	35.000.000	22.239.797	4	4	100%	35.000.000	12.760.203	36,46%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11.160.000	8.183.300	4	4	100%	11.160.000	2.976.700	26,67%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	106.238.000	100.505.000	12	12	100%	106.238.000	5.733.000	5,40%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>	126.420.000	123.725.580	4	4	100%	126.420.000	2.694.420	2,13%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67.420.000	67.328.580	2	2	100%	67.420.000	91.420	0,14%

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan (PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN)	Pagu anggaran (perubahan terakhir) Rp	Realisasi Anggaran Rp	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Output/kinerja	(Pagu anggaran x capaian output / kinerja)	(Pagu anggaran x capaian output / kinerja) - Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59.000.000	56.397.000	1	1	100%	59.000.000	2.603.000	4,41%

Dari penjelasan tabel Capaian Kinerja (Perubahan) dan Rincian Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 dapat disimpulkan menjadi tabel 3.5

**Tabel 3.5**  
**Efisiensi Kinerja Sasaran Tahun 2025**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	70,54%	70,63%	100%	908.531.800	878.317.680	96,67%	3,33%
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	UM	3	3	100%	891.441.330	882.985.588	99,05%	0,95%
Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	Skor	92	92,42	100%	3.358.804.568	3.175.755.962	94,55%	5,45%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan UKM	Skor	83,5	83,58	100%				

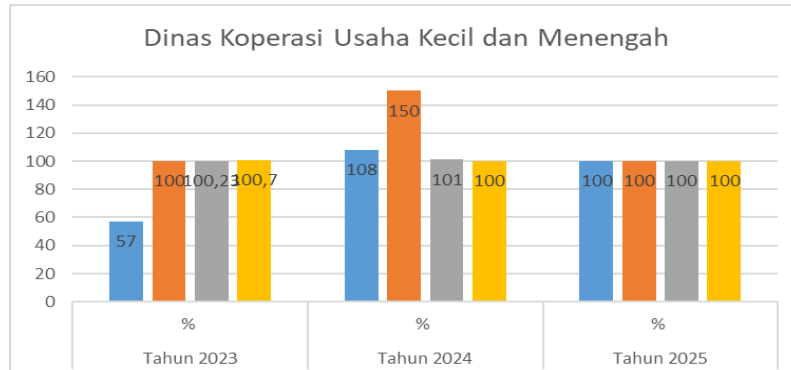
**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;**

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	70	40	57	70%	76%	108	73%	73%	100
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	1	1	100	2 UM	3 UM	150	3 UM	3 UM	100
Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	91	91,21	100,23	91	91,91	101	92	0,9242	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan UKM	82	82,58	100,7	83	83,05	100	83,5	0,8358	100

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 s.d 2025 untuk indikator persentase koperasi sehat pada tahun 2023 mengalami penurunan cukup besar tetapi untuk indikator

yang lain tercapai diatas 100 % semua bahkan ada kenaikan di setiap tahunnya. Peningkatan produktivitas usaha mikro juga melebihi target di tahun 2024 mencapai 150%. Dapat dilihat pada diagram dibawah ini.



Keterangan :

- : Warna biru melambangkan persentase koperasi sehat
- : Warna oranye melambangkan persentase Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas
- : Warna abu melambangkan persentase Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM
- : Warna kuning melambangkan persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

**Tabel 3.7**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	71%	72%	97,46%
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	3 UM	5 UM	60,00%
3	Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM	92,4	94	98,32%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM	83,58	85,5	97,75%

Pada sasaran pertama meningkatnya produktivitas koperasi indikatornya Persentase Koperasi sehat pada tahun 2025 sudah mencapai target akhir renstra, karena untuk formulasi perhitungan kita setiap tahun data yang kita gunakan berubah. Data yang kita hitung berdasarkan data tahun tersebut. Jadi tahun akhir 2029 kita masih menargetkan dibawah realisasi tahun 2025.

Pada sasaran kedua Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro indikatornya Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas realisasi tahun 2025 sebanyak 3 UM dan target akhir tahun renstra (2029) sebanyak 5 UM sehingga tingkat kemajuan 60 %. Tetapi sebenarnya untuk UM naik kelas itu setiap tahun tidak bisa sama karena mengacu pada proses di mana sebuah usaha berusaha meningkatkan kualitas produk dan usaha, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, membangun branding yang kuat, memenuhi standarisasi produk dan meningkatkan kemitraan serta pangsa pasar.

Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi UKM indikator pertama Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM realisasi pada tahun 2025 adalah 92,42 dan target akhir renstra tahun 2029 adalah 94 tingkat kemajuan capaian kinerja sebesar 98,32% sehingga kurang 1,68 % untuk mencapai target renstra. Sedangkan indikator kedua Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM realisasi pada tahun 2025 sebesar 83,58 dan target akhir renstra tahun 2029 adalah 85 tingkat kemajuan capaian kinerja sebesar 97,75 % sehingga kurang 2,25 % untuk mencapai target renstra.

**4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;**

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Capaian dengan Kota Mojokerto Tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 Kota Mojokerto	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	71	42	169 %
2.	Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyeenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM	92,42	85,17 (A)	108,51 %

Pada sasaran pertama meningkatnya produktivitas koperasi indikatornya Persentase Koperasi yang berkualitas kalau dibanding dengan realisasi capaian Kota Mojokerto capaian kita terlalu tinggi karena Kota Mojokerto menghitung pertumbuhannya, sedangkan untuk nilai sakip kalau dibanding Kota Mojokerto nilai kita lebih tinggi yaitu dengan perbandingan capaian sebesar 108,51%

**5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:**

**Tabel 3.9**  
**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	70,54%	70,63%	100%	Berhasil karena Pembinaan dan pendampingan yang maksimal dengan segala keterbatasannya baik dari sisi jumlah pegawai dan anggaran
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	3	3	100%	Berhasil karena adanya pendampingan UM baik dari Kabupaten maupun dari Propinsi
Meningkatnya Kepuasan Layanan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi	92	92,42	100%	Adanya kerjasama yang baik dari seluruh pihak pada

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	UKM				internal Dinas Koperasi UKM. Selain itu, setiap rekomendasi Tim Evaluator Kabupaten atas data dukung SAKIP telah ditindaklanjuti dan dipenuhi secara langsung oleh Dinkop UKM
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM	83,50	83,58	100%	Memberikan pelayanan yang terbaik

Pada tahun ini sasaran Meningkatkan Produktivitas Koperasi indikator kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas telah tercapai melampaui target yaitu sebesar 70,63%. Hal ini dikarenakan adanya Pembinaan dan pendampingan yang maksimal dengan segala keterbatasannya baik dari sisi jumlah pegawai dan anggaran serta memberikan sosialisasi dan bimtek kepada koperasi.

Jumlah usaha mikro naik kelas pada tahun 2025 sudah mencapai target dengan capaian sebesar 3 UM. Dimana 3 UM tersebut sudah siap untuk masuk Usaha kecil dan di selanjutnya dibina oleh Provinsi Jawa Timur bahkan sudah siap untuk ekspor. Keberhasilan capaian tersebut adanya pendampingan UM baik dari Kabupaten maupun dari Propinsi serta adanya bantuan baik dari sisi packaging dan pemasaran.

Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM telah tercapai melampaui target, yaitu sebesar 92,42%. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik dari seluruh pihak pada internal Diskopukmperindag. Setiap komponen penilaian SAKIP baik Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja maupun Pelaporan Kinerja telah dimiliki dan dipenuhi sesuai standart. Selain itu, setiap rekomendasi Tim Evaluator Kabupaten atas data dukung SAKIP telah ditindaklanjuti dan dipenuhi secara langsung oleh Dinkop UKM.

Secara keseluruhan, pelayanan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Magetan telah dinilai baik dan mampu memberikan kepuasan terhadap penerima layanan. Dari kesembilan unsur pelayanan yang diukur, penilaian tertinggi diperoleh pada unsur Biaya/Tarif, sedangkan penilaian terendah diperoleh pada unsur Waktu Penyelesaian. Meski demikian, unsur Waktu Penyelesaian masih dalam kategori baik. Hal ini

merupakan hasil dari kerja keras dan kerja sama seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dinas Koperasi UKM dalam memberikan pelayanan.

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan atau regulasi yang sering berubah</li> <li>2. Masih banyak laporan Keuangan Koperasi yang tidak akurat</li> <li>3. Masih banyak laporan keuangan koperasi yang belum transparan</li> <li>4. Jumlah sasaran koperasi yang di nilai kesehatannya tidak proporsional dengan jumlah pengawas koperasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pendampingan yang maksimal dengan segala keterbatasannya baik dari sisi jumlah pegawai dan anggaran</li> <li>2. Pendampingan koperasi dari petugas PPKL pusat.</li> <li>3. Adanya Pelatihan dan sosialisasi mulai dari aspek keuangan, permodalan, SDM dan Kelembagaan</li> </ol>
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya pemasaran dan kemitraan UMKM</li> <li>2. Laporan keuangan yang belum bankable</li> <li>3. Rendahnya kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi</li> <li>4. Lemahnya branding UMKM dan Legalitas UMKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pendampingan</li> <li>2. Fasilitasi perijinan dan legalitas UMKM</li> <li>3. Penguatan kelembagaan UMKM</li> <li>4. Pendidikan dan Pelatihan</li> </ol>
Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ASN kurang memahami tuisi</li> <li>2. Birokrasi yang lambat dalam menghadapi perubahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas SDM ASN</li> </ol>

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, untuk sasaran Meningkatkan Produktivitas Koperasi dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang berkualitas pada permasalahan Peraturan atau regulasi yang sering berubah , Masih banyak laporan Keuangan Koperasi



nominal, dan dokumen pendukung dokumen excel pengajuan Panjar. Si Panji akan di isi oleh setiap bidang pada awal bulan. Setelah itu akan diperoleh hasil pencatatan & laporan Otomatis yang bersumber dari Google Form tersebut.

## 2. Si Dokar (digitalisasi dokumen masuk dan keluar)

Si Dokar merupakan sistem yg dimiliki dinas koperasi dan ukm terkait digitalisasi dokumen masuk dan keluar sebagai media untuk mempermudah pegawai mencari/mendistribusikan surat.



The image shows a mobile screenshot of a Google Form titled "SI DOKAR (DIGITALISASI DOKUMEN ARSIP MASUK-KELUAR)". The form is displayed on a smartphone screen with a status bar at the top showing the time 14:03 and 79% battery. The form header features a decorative image of books. Below the title, the form owner's email "dinarjuita09@gmail.com" is listed with a "Ganti akun" link. A warning message states: "Nama, alamat email, dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini". A red asterisk indicates required questions. The first question is "Jenis Surat \*" with two radio button options: "Surat Masuk" (selected) and "Surat Keluar". At the bottom, there are buttons for "Berikutnya" and "Kosongkan formulir".

## PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025

Selama Tahun 2025, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan antara lain:

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan meraih Penghargaan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terbaik I atas Pencapaian Transaksi E-Purchasing Tertinggi se-Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik.



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

### **A. SIMPULAN**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun n dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun.2025. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

#### **Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas Koperasi**

- Sasaran ke-1 meningkatnya produktivitas koperasi terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil) dan telah mencapai target;

- Sasaran ke-1 didukung oleh 5 (lima) Program yang terdiri dari 5 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)
- Sasaran ke-1 didukung oleh 6 (enam) Kegiatan terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)

### **Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro**

- Sasaran ke-2 meningkatnya produktivitas usaha mikro terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil) dan telah mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 2 (dua) Program yang terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh 2 (dua) Kegiatan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)

### **Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM**

- Sasaran ke-3 meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator pertama sebesar 100% (kategori sangat berhasil) dan indikator kedua sebesar 100 % dan telah mencapai target;
- Sasaran ke-3 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat berhasil)
- Sasaran ke-3 didukung oleh 5 (lima) Kegiatan terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)

Tabel 4.1  
 Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan  
 Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
				(%)
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	70,54%	70,63%	100%
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	3	3	100%
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyeenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM	92%	92,42%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM	83,50%	83,58%	100%
<b>Capaian Kinerja</b>				<b>100%</b>
				<b>SANGAT BAIK</b>

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp 4.937.059.230,00 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 95,7 %.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2025 ini turun jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 114,74 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah adanya pendampingan kepada koperasi dan Usaha Mikro.

Serapan anggaran tahun 2025 ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 95,5 %.

### **RENCANA AKSI TAHUN 2026**

Atas dasar pencapaian kinerja tahun n tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2  
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan  
Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
1. Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Presentase Koperasi aktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan fasilitasi ijin usaha koperasi</li> <li>2. Melaksanakan kualitas kelembagaan koperasi</li> <li>3. Melaksanakan peningkatan kualitas usaha koperasi</li> <li>4. Melaksanakan fasilitasi kualitas SDM perkoperasian</li> <li>5. Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi</li> <li>6. Pelaksanaan pengembangan usaha koperasi</li> </ol>
2. Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM</li> <li>2. Fasilitasi pemasaran bagi UMKM</li> <li>3. Fasilitasi penumbuhan wirausaha baru</li> </ol>
3. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik Dinas Koperasi UKM	Nilai SAKIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah</li> <li>2. Pelayanan kesekretariatan perangkat daerah</li> </ol>
	Indeks Kepuasan Masyarakat	

Atas rencana aksi tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2026**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Presentase Koperasi aktif				71%	71%
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas				4 UM	4 UM
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik Dinas Koperasi UKM	Nilai SAKIP				92,5	92,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat				83,75%	83,75%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, 18 Februari 2026

KEPALA DINAS DINAS KOPERASI  
 USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 KABUPATEN MAGETAN



**Supartha, S.Sos., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda/IVc  
 NIP. 197404281999012001

## **LAMPIRAN**

**A. Matriks Renstra RPD dan RPJMD**

**B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD**

**C. Matriks Renja Tahun n dan Perubahannya**

**D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun n dan perubahannya**

**E. Pengukuran Kinerja**

**F. Pohon Kinerja**

**G. Rencana Aksi Tahun 2026**